PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI MADRASAH

Dr. Connaidi, M.Pd.I

Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak Riau

Email. connaidijhon43296@gmail.com

ABSTRAK

Ada sebuah gagasan besar mengapa pendidikan agama diposisikan begitu penting dalam konteks pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, yakni disamping mewujudkan misi keseimbangan antara pembinaan akal dan kalbu agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat sebagaimana dipesankan dalam ajaran agama, kekuatan spritual yang dilandasi keagamaan akan menjadi daya dukung kekuatan dalam mewujudkan berbagai perubahan yang membawa perbaikan bagi bangsa kedepan namun madrasah belum mendapatkan perhatian penuh di Indonesia dan inilah yang menjadi tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi ril madrasah, dengan objek kajian "Problematika pendidikan di Madrasah". Dengan melalui metode literatur menjadikan buku-buku dan jurnal sebagai referensi maka dalam hasil penelitian ini ditemukan jumlah rasio madrasah dan berbagai persoalan yang muncul serta upaya yang dilakukan untuk mengembalikan jati diri ummat Islam dalam menegmbalikan madrasah sebagai suatu lembaga yang berkualitas. Adapun untuk tingkat RA,MI,MTs dan MA pada masa orde baru Indonesia berjumlah 36534, sekarang 82.128 sedangkan Riau, 1,894 lembaga, dan Siak 19. Maka dalam penelitian ini ditemukan berbagai permasalahan pada madrasah yaitu : **Pertama** : persoalan dualisme pengelolaan pendidikan, **Kedua**, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta. **Ketiga**, persoalan mutu madrasah, **Empat** : Beban kurikulum di madrasah yang cukup banyak. Untuk sebagai solusinya ditawarkan Madrasah harus Memiliki kekuatan Aqidah dan spritual, Keunggulan moral, Penguasaan IPTEK, Penguasaan keahlian dan kematangan profesional sesuai dengan standar nasional dan internasional, Didukung dengan jasmani yang sehat, Mampu berkompetisi dengan lulusan negara lain.

Kata Kunci: *Problematika Pendidikan Madrasah*

PENDAHULUAN

Ummat Islam di Indonesia tetap teguh dalam memandang posisi pendidikan agama merupakan tujuan utama dalam pembentukan generasi melalui pendidikan di lembaga madrasah baik MI/MTs ataupun MA. Perumusan pendidikan tujuan

Nasional dalam UU No 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangat kental muatan idealisme keagamaannya. Lulusan madrasah masyarakat di Indonesia berharap agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.SWT, memiliki keterampilan, keahlian, dan tetap memiliki patriotisme yang kuat. Oleh karena itu, pada setiap jenis dan jenjang pendidikan diberikan pendidikan agama Islam (bagi peserta didik yang beragama Islam), bahkan disetiap sekolah disediakan saqrana pembinaan keagamaan dan juga diberi peluang penyelenggaraan ekstra kurikuler keagamaan.

Ada sebuah gagasan besar mengapa pendidikan agama diposisikan begitu penting dalam kontek pembinaan dan pengembangan SDM bangsa, yakni disamping mewujudkan misi keseimbangan antara pembinaan akal dan kalbu agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat sebagaimana dipesankan dalam ajaran agama, kekuatan spritual yang dilandasi keagamaan akan menjadi daya dukung kekuatan dalam mewujudkan berbagai perubahan yang membawa perbaikan bagi bangsa ke depan.¹

Niat yang begitu besar dari diri masyarakat muslim di Indonesia namun sampai saat ini posisi madrasah kini sangat dilematis, sebagai lembaga pendidikan seharusnya terotonomisasikan sesuai UU No 22 Th 1999 Tentang Pemerintah daerah. Akan tetapi sebagai Institusi Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama, madrasah tidak terotonomisasikan. Akan tetapi posisi tersebut kurang menguntungkan bagi madrasah, karena tidak disambut hangat oleh pemerintah

¹ Dede Rosyadah, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, Percetakan PT. Kharisma Putra Utama, 2017, h, 46

daerah, atas dasar itulah, kemudian Menteri Agama menerbitkan Surat No. MA/402/2000-ter Tgl 21 November 2000, yang menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah umum dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah (MA) diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota yang meliputi aspek operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan anggaran. Adapun kewenangan lain dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PP No 25 Th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi dan/kabupaten kota sebagai otonomi daerah, sepanjang yang menyangkut pendidikan agama dan keagamaan masih tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Kendati demikian sebelum ada keputusan politik yang lebih tegas dari kementerian Agama RI untuk melepaskan Madrasah dan menyerahkan secara penuh pada pemerintah daerah, pihak pemerintah daerah tidak akan bertanggungjawab secara penuh terhadap jenis pendidikan berciri khas keIslaman tersebut.²

Kondisi yang kurang ideal ini yang patut dipertanyakan karena disatu sisi kurangnya perhatian pemerintah namun madrasah semakin berkembang pesat dari jumlah lembaga daritahun ke tahun. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melihat dan mengkaji keadaan madrasah di Indonesia sehingga akan menjadi pengetahuan dalam mengembangkan madrasah yang lebih unggul dan kompeten di masa yang akan datang. Oleh karena itu yang menjadi fokus kajian ini berkaitan dengan “Keberadaan Madrasah di Indonesia”.

METODOLOGI

² Dede Rosyada *Ibid*, h, 48

Penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan objek penelitian Problematika Pendidikan Di Madrasah, dengan mengambil referensi dari berbagai sumber baik buku maupun jurnal yang terakreditasi lalu dianalisis dan menyimpulkan tentang problematika pendidikan di Madrasah.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Madrasah

Awal mulanya pendidikan Islam dilakukan di rumah tangga, kuttab, maupun masjid dalam kegiatan pengajaran yang berlangsung atas dasar keilmuan dan spritual keagamaan dengan tujuan dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.³ Pendidikan Islam kemudian berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat muslim saat ilmu pengetahuan semakin berkembang serta perkembangan kebutuhan dakwah Islam pada masa itu dan dikenal dengan madrasah. Istilah madrasah dalam kamus bahasa arab berasal dari kata “*darsah*” yang berarti tempat duduk untuk belajar. Selanjutnya dapat berubah menjadi “*mudarrisun*” isim fail dari kata *darasa* (mazid tasydid) yang berarti pengajar. Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata madrasah adalah sekolah atau perguruan biasanya yang berdasarkan yang beragama Islam. Selain itu beberapa ahli memberikan pengertian madrasah sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam

³ Muslimin, K. 2004. “*Pertumbuhan Madrasah di Masa Awal*” dalam buku *Bunga Rampai Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa, h.60

pengetahuan agama Islam.⁴ dalam pengertian lain Zuhairi juga menyebutkan madrasah adalah tempat belajar untuk mrngajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya.⁵

Dengan demikian dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa madrasah adalah suatu tempat dimana berlangsungnya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dengan secara terarah dan terkendali.

2. Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia

Madrasah pertamakali lahir di Indonesia adalah madrasah Adabyah di Padang Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1090 oleh Sekh Abdullah Ahmad. Madrasah Adabyah merupakan sekolah pendidikan Islam pertama yang memasukkan pelajaran umum kedalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 berdiri pula madrasah *Scool* (sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Dinyah *Scool* (madrasah dinyah) yang kemudian berkembang hampir diseluruh Indonesia. Tahun 1916, di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng telah didirikan madrasah Salfiah. Pada madrasah tersebut dilakukan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada kurikulum madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918, juga didirikan madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian menjadi madrasah Mu'allimin Muhammadiyah.⁶

Perkembangan madrasah sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan mengalami pasang surut, seirama dengan kebijakan pemerintah maupun pengalaman intern ummat Islam itu sendiri. Kebijakan pemerintah Hindia

⁴ Eliade Mircea. 1993. *The Encyclopedia of Religion*. Newyork: Mac Millan Publishing Company, h. 77

⁵ Zuhairi.. *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhani, 1993

⁶ Hasbullah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 169

belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi. Ada kekhawatiran Belanda terhadap munculnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salahsatu bentuk kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah dengan terbitnya ordonansi guru pada tahun 1905 dan pada tahun 1926.⁷

Namun setelah merdeka, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam meningkat, indikasinya adalah maklumat BPKNIP tertanggal 22 Desember 1945 yang intinya memajukan pendidikan di langgar, surau, masjid, dan madrasah terus ditingkatkan.⁸ Pemerintah semakin memperhatikan madrasah dan pesantren semakin kuat setelah didirikannya Kementerian Agama. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara luas. Pada masa orde lama ditandai dengan perkembangan madrasah yang cukup menonjol. Pada masa ini berdiri PGA, dan juga mulai adanya penegerian madrasah swasta pada semua tingkatan. Pada masa awal orde baru, kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Perkembangan yang cukup signifikan dalam rangka pembinaan mutu pendidikan madrasah adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa SKB tiga menteri maret 1975. Isi SKB tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah lanjutan Tingkat

⁷ Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 2001), h, 12.

⁸ Ibid, 15

Pertama (SLTP), dan Madrasah Alyah (MA) setingkat dengan Sekolah menengah Atas (SMA).⁹

3. Perkembangan Madrasah sejak orde baru hingga sekarang

Jika dilihat sejarah perkembangan jumlah madrasah di masa orde baru berjumlah 36534 lembaga¹⁰. Seiring dengan pesat perkembangan madrasah ditengah masyarakat baik ditingkat daerah maupun pusat. Dari data yang diperoleh melalui data emispendis 2019-2020 kondisi terakhir saat ini kemajuan perkembangan jumlah kuantitatif madrasah semakin meningkat tajam dengan data yang diperoleh tahunajaran 2019-2020 melalui laman emispendis.kemenag.go.id sebagai berikut :

Jenjang	Lembaga	Siswa LK	Siswa Pr	Guru LK	Guru Pr
RA	29.598	653.793	639.729	6.938	121.207
MIS	23.868	1.809.770	1.640.556	110.383	163.410
MIN	1.711	276.487	254.217	13.550	27.614
MTsS	16.557	1.293.786	1.163.345	126.686	123.772
MTsN	1.523	359.189	403.272	25.451	36.405
MAS	8.064	482.833	554.866	64.372	55.938
MAN	807	177.147	288.460	18.172	22.551
Total	82.128	5.053.005	4.954.445	365.552	550.897

⁹ Ibid h,15

¹⁰ Dede Rosyadah, MA. Madrasah dan Profesionalisme Guru, Percetakan PT. Kharisma Putra Utama, 2017, h, 21.

Dari data diatas maka terlihat jumlah lembaga Madrasah di Indonesi mulai tingkat RA 29.598, MIS 23.868 MIN 1.711, MTsS 16.557 MTS N 1.523, MAS 8.064 MAN 807. dengan jumlah Total : 82.128 lembaga. ¹¹

Adapun jumlah madrasah yang ada di Propinsi Riau 2019-2020 adalah sebagai berikut seperti dalam tabel dibawah ini :

Jenjang	Lembaga
RA	503
MIS	439
MIN	19
MTsS	585
MTsN	34
MAS	293
MAN	21
Total Madrasah di Riau keseluruhan yang Negeri	74
Total Madrasah di Riau keseluruhan yang Swasta	1,82
Total Total Madrasah di Riau keseluruhan yang Negeri dan Swasta	1,894

Dari tabel diatas maka rincian madrasah yang ada di Propinsi Riau adalah RA 503, MIS 439 MIN 19, MTSs 585 MTSN 34, MAS 293 MAN 21. Total Madrasah Negeri di Riau 74, Swasta 1,82, Total keseluruhan 1,894 (Seribu delapan ratus sembilan puluh empat lembaga negeri dan swasta. ¹² Sedangkan untuk di Kabupaten Siak sendiri jumlah madrasah baru 19 madrasah yang terdiri dari 12 Kecamatan hanya 1 madrasah yang negeri yang

¹¹ Emispendis.kemenag.go.id. 07-April-2021

¹² <http://emispendis.kemenag.go.id>.Selasa 19 April 2021

lainnya swasta.¹³ jika dibandingkan dengan SMA dan SMK jumlahnya 30 Lembaga 22 yang negeri 18 swasta.¹⁴

4. Integrasi Madrasah

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional pada akhir dekade 1980-an. Ketika pemerintah mengesahkan UU No. 2/1989 tentang sitem pendidikan nasional. Secara operasional UU ini perkuat dengan peraturan Pemerintah No. 28 Th 1990 dan 1 SK Mendikbud No. 048/U/1992 dan No 054/U/1993 yang anantara lain menetapkan bahwa MI/MTS wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. SK ini ditindak laanjuti dengan SK Menteri Agama No. 638 369 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang madrasah alyah diperkuat dengan PP NO 29 Tahun 1990,SK Mendikbud No. 0489/U/1992 dan SK Meneteri Agama No 370 Tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan abtara MI/MTs/MA dengan SD/SLTP/SMA, dengan ciri khas agama Islamnya.¹⁵

Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasai dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut menurut Karl Stembrink sebagaimana dikutip Rahadjo meliputi tiga aspek yaitu ;

1. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan pesantren
2. Penyesuaian dengan sistem pendidika barat

¹³ <https://emka.web.id/data/2016/10daftar-alamat.ma-se-kab-siak>,Selasa 19 April 2021

¹⁴ <https://ww.umm.ac.id/id/pages/riau/data-sma-dan-smk-kab-siak>,Selasa 19 April 2021

¹⁵ *Ibid*, h, 30

3. Dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan barat.¹⁶

Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah disebut sebagai sekolah yang bercirikan Islam sampai sekarang ini madrasah masih terus mencari bentuk idealnya. Identifikasi madrasah bermuara pada dua hal, yaitu prolem *interply* (tarik ulur) kebijakan madrasah dalam integrasi sistem pendidikan nasional dan rendahnya tingkat apresiasi masyarakat dalam upaya pengembangan madrasah.¹⁷

Meskipun demikian, madrasah masih terus berusaha keras menghadapi berbagai persoalan yang ada. Masalah yang harus dihadapi adalah :

- a. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya. Keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren
- b. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah dinyah.¹⁸

Sejak awal abad ke 20 madrasah telah mengalami perkembangan sangat pesat sampai saat ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 23.298 madrasah, madrasah Tsanawiyah (MTs) mencapai 9.846 Mts, dan Madrasah Alyah (MA) mencapai, 3.392 madrasah total 36534. Secara kualitatif, prestasi akademik bidang keagamaan madrasah lebih unggul dibandingkan dengan sekolah umum pada berbagai

¹⁶ Raharjo, "Madrasah Sebagai The Centre of Excellence," dalam Ismail SM (ed.), *Dinamika Pesantren*, 26.

¹⁷ Luqman Hakim, *Madrasah Tsanawiyah Terbuka*, (Jakarta: Depag. RI., 2004),v.

¹⁸ Rahardjo, *Madrasah*, 27

jenjang pendidikan. Namun prestasi akademik bidang mata pelajaran umum, madrasah belum sederajat dengan pendidikan umum. Disinilah merupakan tantangan bagi kita ummat Islam untuk terus meningkatkan prestasi akademik bidang mata pelajaran umum. Dengan tetap meningkatkan prestasi akademik bidang keagamaannya. Sejarah panjang pertumbuhan madrasah sejak pertumbuhan dan perkembangannya diprakasai masyarakat, kemudian diserap dalam program pemerintah dengan berdirinya kementerian agama RI, dan memperoleh pengakuan kesederajatan dengan sekolah umum lainnya pada th 1974. Melalui UU No,20 Th 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional, posisi madrasah diakui sama dengan sekolah umum, namun pengelolaan dan pembinaannya tetap dibawah kementerian agama.

Perbedaan perlakuan yang dilakukan pemerintah, setidaknya selama masa orde baru, telah membuat madrasah sangat tertinggal dalam pembinaan kualitas, baik pengelolaan sekolah, layanan proses pembelajaran, maupun kualitas hasil belajar. Akan tetapi, kini telah berkembang berbagai program dalam tema-tema *soscal equity* yakni keadilan sikap antara sekolah dan madrasah, tanpa perbedaan diskriminatif yang tak berkeadilan. Oleh sebab itu kini berbagai program dan perlakuan pemerintah sudah hampir seimbang, kecuali perlakuan pemerintah daerah yang senantiasa dengan berbagai argumentasi membatasi partisipasinya terhadap pembinaan madrasah. Padahal, siswa madrasah adalah masyarakatnya. Siswa adalah putra-putra daerah yang juga

membayar pajak untuk daerah, tetapi mengapa sampai kini, mereka membatasi perlakuan terhadap madrasah.¹⁹

Dari berbagai persoalan diatas mulai dari ketertinggalan prestasi akademik umum tertinggal, walaupun melalui UU No,20 Th 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional, posisi madrasah diakui sama dengan sekolah umum namun perbedaan itu tetap ada, persoalan ini tidak berhenti sampai disitu saja, anak-anak yang di Madrasah itu juga merupakan putra daerahnya sendiri tetapi fakta melihat itu masih saja terdapat kesenjangan perlakuan pemerintah terhadap putra-putri daerahnya sendiri.

Namun walaupun demikian Madrasah sampai kini tetap konsisten, bahwa madrasah lahir dari masyarakat dan besar bersama masyarakat, nyaris tak pernah memiliki ketergantungan pada pemerintah. Namun dengan segala keterbatasannya madrasah masih terus mengenjot prestasi akademiknya, sehingga perbedaan prestasi belajar madrasah tidak tertinggal jauh dari sekolah umum, bahkan beberapa madrasah mengungguli sekolah umum. Akan tetapi pengakuan kualitatif dari para pemakai lulusan dan para pelanggan sekolah tidak cukup tanpa ada pengakuan legal dari pemerintah. Oleh sebab itulah, kini dikembangkan sistem evaluasi external melalui oleh badan akreditasi nasional sekolah/madrasah BAN S/M.²⁰

5. Permasalahan Madrasah Di Indonesia

¹⁹, Dede Rosyadah, *Ibid*, h, 20.

²⁰ *Ibid*, h, 21

Berkembangnya Madrasah tidak lepas dari berbagai persoalan yang mendera, antara lain persoalan pengelolaan madrasah yang berada dibawah pembinaan dua kementerian yaitu dinas pendidikan dan kementerian agama, belum lagi persoalan kesenjangan antara negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah.

Pertama : persoalan dualisme pengelolaan pendidikan, madrasah dibawah kemendiknas dan kementerian agama. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Anggaran pendidikan untuk madrasah yang diambil dari anggaran pendidikan langsung dikelola oleh kemenag. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada diseluruh Indonesia. Sehingga kucuran dana yang diberikan menjadi terbagi dan lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. selain itu juga kesejahteraan guru di madrasah juga sangat memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia.

Kedua, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan untuk madrasah negeri dan swasta. Perbedaan perlakuan ini sangat dirasakan oleh madrasah swasta. Pemberian bantuan pendidikan di no duakan. Contohnya saja dalam pemberian beasiswa baik untuk siswa maupun guru. Sarana dan prasarana pun kurang memadai. Pembinaan madrasah yang minim perhatian.

Ketiga, persoalan mutu madrasah, seperti yang diungkap Supangat: meskipun madrasah telah berkontribusi bagi pencerdasan kehidupan bangsa, namun masih menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindari.²¹ menurut Amirullah dkk, hambatan terbesar yang dihadapi madrasah adalah sebagai berikut :

Rendahnya kualitas proses pendidikan yang ada didalamnya. Hal ini terjadi karena aspek manajemen, kurikulum, dan kualitas tenaga pendidiknya yang dinilai masih rendah. Pada umumnya madrasah masih dihadapkan beberapa kendala yang mempengaruhi mutu baik proses maupun hasil pendidikan, baik berkenaan dengan latar belakang siswa dan keluarganya, dukungan berbagai sumber pendidikan, kualifikasi dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Permasalahan yang dihadapi madrasah terutama pada pencapaian mutu dipicu karena tidak terpenuhinya standar-standar tertentu, seperti infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, calon siswa, proses pembelajaran, dan manajemen kelembagaan.²² Menurut Amirullah persoalan yang dihadapi madrasah yang ke

Empat : Beban kurikulum di madrasah yang cukup banyak, kurikulum yang diterapkan kurikulum sekolah umum dan ditambah lagi kurikulum bercirikan khas Islam. Mata pelajaran keislaman menjadi tambahan dengan proporsi sepenuhnya diserahkan kepada madrasah dan presentasi kurikulum 100 % agama dan 100 %

²¹ Supangat 2011. “ *Transformasi Madrasah dala Sistem Pendidikan nasional*” Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No.1

²² Amirullah 2012. ” *Studi Kebijakan Pemda di Bidang Pendidikan Agama*”. Analisis terhadap kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Malang. IAIIN Sunan Ampel Surabaya.

umum. Hal ini mengakibatkan beban belajar siswa lebih berat dibandingkan siswa sekoloah umum.²³

Dengan demikian pembelajaran di madrasah menurut hemat penulis adalah menjadi persoalan dilema besar yang dihadapi oleh lembaga dan siswa, disatu sisi siswa harus memperkaya ilmu agama namun disisi lain juga harus berhadapan dengan ilmu umum. Sehingga di khawatirkan siswa menguasai ilmu setengah-setengah hal ini yang menjadikan proses pendidikan di madrasah tidak optimal.

Terdapat beberapa persoalan kelemahan pendidikan Islam antar lain : alokasi waktu, kurikulum yang padat, sarana prasarana yang tidak memadai, kompetensi guru dalam menjawab kebutuhan dunia pasar hari ini secara global, disampinh itu metode pembelajaran menjadi persoalan, namun ironinya madrasah terus berjalan dan berkemabng. Kemenag dan Kemendikbud sebagai aktor penting dalam menjawab persoalan ini, duduk bersama menyatukan visi inilah solusi yang terbaik bagi madrasah di masa mendatang.

Prof. Dr. Muhammad Abdussalam, salahseorang ilmuwan Muslima dari Pakistan yang telah meraih hadiah Nobel. Menyatakan: “ Tidak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di Planet ini, sains menempati posisi yang paling lemah dan benar-benar memprihatinkan di dunia Islam. Tidak berlebihan jika dikatakn kelemahan ini berbahaya karena kelangsungan hidup suatu masyarakat di abad ini secara langsung tergantung pada penguasaan sains dan teknologi”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ...”ortodoksi

²³ Faridah Alawyah, *Islam School Education In Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Komplek RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jkt 2014.

agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggungjawab atas lemahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam.²⁴

Dengan demikian untuk mengembalikan sejarah itu Muhaimin menulis dalam bukunya SDM ummat Islam antara lain ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut :

1. Memiliki kekuatan Aqidah dan spritual
2. Keunggulan moral
3. Penguasaan IPTEK
4. Penguasaan keahlian dan kematangan profesional sesuai dengan standar nasional dan internasional
5. Didukung dengan jasmani yang sehat
6. Mampu berkompetisi dengan lulusan negara lain.²⁵

PENUTUP

Madrasah pertamakali lahir di Indonesia adalah madrasah Adabyah di Padang Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1090 oleh Sekh Abdullah Ahmad. Madrasah Adabyah merupakan sekolah pendidikan Islam pertama yang memasukkan pelajaran umum kedalamnya. Adapun perkembangan Madrasah sejak orde baru hingga sekarang masa orde baru berjumlah 36534 lembaga dan sekarang 2019-2020 perkembangan jumlah kuatitatif madrasah semakin meningkat tajam data yang diperoleh tahun 2019-2020 melalui laman emispendis.kemenag.go.id sebagai berikut : Mulai dar RA,MI, MTs,MA Jumlah Madrasah di Indonesia “82.128” sedangkan di Riau “1,894” sedangkan di Siak “19” Madrasah./2019-2020

²⁴ Muhaimin. *Manajemen Pendidikan Islam*, Kencana Predana Media Group, 2010, h.19

²⁵ Muhimin, *Ibid*, h, 21

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional pada akhir dekade 1980-an. Ketika pemerintah mengesahkan UU No. 2/1989 tentang sitem pendidikan nasional. Secara operasional UU ini perkuat dengan peraturan Pemerintah No. 28 Th 1990 dan 1 SK Mendikbud No. 048/U/1992 dan No 054/U/1993 yang anantara lain menetapkan bahwa MI/MTS wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. Adapun problematika Madrasah Di Indonesia sebagai berikut :

Pertama : persoalan dualisme pengelolaan pendidikan, **Kedua**, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta. **Ketiga**, persoalan mutu madrasah, **Empat** : Beban kurikulum di madrasah yang cukup banyak, Prof. Dr. Muhammad Abdussalam, salahseorang ilmuan Muslima dari Pakistan yang telah meraih hadiah Nobel. Menyatakan: “Tidak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di Planet ini, sains menempati posisi yang paling lemah dan benar-benar memprihatinkan di dunia Islam. Tidak berlebihan jika dikatakn kelemahan ini berbahaya karena kelangsungan hidup suatu masyarakat di abad ini secara langsung tergantung pada penguasaan sains dan teknologi”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ...”ortodoksi agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggungjawab atas lemahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam.

Dengan demikian untuk mengembalikan sejarah itu Muhaimin menulis dalam bukunya SDM ummat Islam antara lain ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut :

1. Memiliki kekuatan Aqidah dan spritual
2. Keunggulan moral
3. Penguasaan IPTEK

4. Penguasaan keahlian dan kematangan profesional sesuai dengan standar nasional dan internasional
5. Didukung dengan jasmani yang sehat
6. Mampu berkompetisi dengan lulusan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Dede Rosyadah, MA. *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, Percetakan PT. Kharisma Putra Utama, 2017

Muhaimin MA. *Manajemen Pendidikan Islam*, “Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Kencana Predana Media Group, 2010
Supangat 2011. “ *Transformasi Madrasah dala Sistem Pendidikan nasional*” Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No.1

Hasbullah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Luqman Hakim, *Madrasah Tsanawiyah Terbuka*, (Jakarta: Depag. RI., 2004),v.

Amirullah 2012. ” *Studi Kebijakan Pemda di Bidang Pendidikan Agama*”. Analisis terhadap kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Malang. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Faridah Alawyah, *Islam School Education In Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Komplek RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jkt 2014.

<http://emispendis.kemenag.go.id>, Selasa 19 April 2021

<https://emka.web.id/data/2016/10/daftar-alamat-ma-se-kab-siak>, Selasa 19 April 2021

<https://www.umm.ac.id/id/pages/riau/data-sma-dan-smk-kab-siak>, Selasa 19 April 2021

Raharjo, “*Madrasah Sebagai The Centre of Excellence*,” dalam *Ismail SM (ed.), Dinamika Pesantren*

Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2001)

Muslimin, K.. “Pertumbuhan Madrasah di Masa Awal” dalam buku *Bunga Rampai Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa 2004/

Eliade Mircea. *The Encyclopedia of Religion*. Newyork: Mac Millan Publishing Company/ 1993.

Zuhairi.. *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhani. 1993